

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui fungsi regulasi, perencanaan, implementasi kebijakan, serta mekanisme pemantauan. Peran tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan Keputusan. Hal ini sesuai dengan dalam laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Deputi bidang Pelayanan Publik PANRB, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki nilai strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Melalui partisipasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ruang sinergi yang mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik, khususnya di sektor kepariwisataan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021)

Pernyataan tersebut Sebagai bentuk tata kelola yang efektif, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan berpotensi menjadi pendorong dalam upaya pelestarian warisan budaya dan ekosistem alami, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi jangka Panjang. Beberapa kebijakan yang sudah ditegakkan dan dirancang untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, untuk keberhasilannya bergantung pada bagaimana kapasitas

administrasi publik dan sinergi antar pemerintah dalam mengatur semua Pembangunan yang ada (Samboteng et al., 2024).

Dalam suatu proses pembangunan, tahapan awal yang perlu dilakukan Adalah perencanaan yang terarah dan sistematis. Perencanaan memiliki peran utama dalam menentukan arah dan efektivitas pembangunan, karena pada hakikatnya tujuan pembangunan tidak dapat dicapai secara instan. Melalui perencanaan yang terstruktur, proses pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu, perencanaan yang terstruktur dan terarah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan nasional dan dapat dioptimalkan secara maksimal (Ma'ruf et al., 2024).

Pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun beberapa kelompok dari tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkan kesenangan yang bersifat sementara sebagai usaha mencari keseimbangan dan keserasian kebahagiaan dengan lingkungan hidup. Kenikmatan yang diperoleh dalam perjalanan pariwisata dapat berupa edukatif, ketenangan ataupun pengalaman lainnya (Husna, 2022). Pariwisata memiliki kontribusi dalam perekonomian Indonesia, dikarenakan pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Fadilla (2024) kontribusi yang diberikan sektor pariwisata kepada negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,8% di tahun 2023 yang diprediksi meningkat hingga 7,4% di tahun 2027 dan pendapatan daerah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan Kementerian Pariwisata republik Indonesia (2025) bahwa Menurut Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV Tahun 2024 yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa sebesar 16,71 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2024. Pariwisata juga disebut *multipier effect* dikarenakan kontribusinya yang besar di berbagai industri seperti perhotelan, restoran, transportasi, jasa pemandu wisata serta ekonomi kreatif yang berkembang di sekitar destinasi wisata (Manthofi & Aisyah, 2024).

Saat ini pemulihan perekonomian di sektor pariwisata pasca pandemi covid-19 dilakukan secara intensif untuk menghidupkan kembali industri pariwisata yang terdampak pada krisis global. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan seperti *lockdown* dan pembatasan mobilitas selama pandemi memicu kontraksi ekonomi secara signifikan, terutama pada sektor perhotelan, dengan adanya hal tersebut terjadi peningkatan angka pengangguran, penutupan usaha kecil dan tekanan fiskal pada negara yang bergantung pada sektor pariwisata (Tangkudung et al., 2024). Seiring dengan proses pemulihan, pola kunjungan wisatawan bergeser ke destinasi yang mengutamakan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, pemanfaatan platform digital digunakan sebagai sarana perencanaan dan pemesanan perjalanan. Dengan adanya hal tersebut, industri pariwisata dituntut untuk beradaptasi dengan cepat pada tren pariwisata sekarang demi mempertahankan daya saing global.

Dengan mengadopsi tren wisata berkelanjutan, sektor pariwisata di Indonesia akan bertransformasi menuju industri yang lebih inklusif, dan berbasis teknologi. Wisata berkelanjutan memerlukan Penguanan kolaborasi swasta, pemerintah, pengusaha wisata dan masyarakat menjadi kunci untuk

mewujudkan pariwisata yang adaptif. Penerapan pariwisata berkelanjutan secara optimal dapat dicapai melalui pemanfaatan inovasi teknologi, keterlibatan aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan yang responsif, sehingga menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal dan lingkungan global (Badan Otorita Borobudur, 2025).

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang berkembang untuk merespons terhadap kebutuhan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dalam industri pariwisata. Dalam mencapai indikator keberhasilan penerapan pariwisata berkelanjutan diperlukan Prinsip pariwisata sebagai panduan untuk memastikan keberlanjutan di masa depan, menurut Suharto et al., (2024) Prinsip pariwisata berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, karena keduanya merupakan daya tarik utama yang perlu dijaga dari degradasi. Kedua, pengelolaan yang inklusif dan adil, agar manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama komunitas lokal.

Ketiga, partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan mendorong kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Keempat, edukasi pemangku kepentingan, untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap budaya lokal serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kelima, pengurangan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan promosi transportasi ramah lingkungan. Keenam, diversifikasi produk wisata, guna mengurangi tekanan pada satu lokasi dan mendistribusikan dampak ekonomi secara merata. Terakhir, kemitraan antar

pemangku kepentingan, yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM dalam mendukung praktik pariwisata berkelanjutan.

Dengan adanya prinsip tersebut, Pariwisata berkelanjutan dapat memberikan Kesan kepada wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Lokal. Pariwisata berkelanjutan memerlukan komitmen jangka Panjang dari semua pemangku kepentingan, Kesadaran wisatawan, keterlibatan Masyarakat Lokal, dukungan regulasi, dan inovasi teknologi harus berjalan sinergis untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator yang mengatur kebijakan dan memberikan insentif bagi pengelolaan wisata berkelanjutan, sektor swasta berkontribusi dalam implementasi konsep keberlanjutan melalui investasi dan inovasi dalam layanan wisata, Masyarakat Lokal sebagai pihak yang terdampak terlibat dalam pengambilan Keputusan terkait pengelolaan destinasi wisata (Prasetyo, 2025). Hal ini ditegaskan pada laman online Antaranews.com, (2024) pada Konferensi Pariwisata Asia Pasifik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

“diperlukan upaya yang lebih pada kolaboratif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan pariwisata Indonesia adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Harapan saya dengan semua pihak kolaborasi dapat mencapai sukses target dengan membuka 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata”.  
Sumber:[https://www.antaranews.com/berita/3910533/menparekraf-fokus-garap-pariwisata-berkelanjutan-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/3910533/menparekraf-fokus-garap-pariwisata-berkelanjutan-2024?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Salah satu implementasi dari pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata memiliki keterkaitan langsung dengan konsep *sustainability tourism* atau pariwisata berkelanjutan, karena desa wisata merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor pariwisata. Desa wisata menjadi bagian penting dalam implementasi pariwisata berkelanjutan karena memiliki potensi daya tarik wisata, fasilitas akomodasi, aksesibilitas, serta amenitas yang terintegrasi dalam satu sistem yang melibatkan masyarakat lokal. Partisipasi aktif dan kedudukan masyarakat lokal sangat penting dalam mewujudkan sebuah desa wisata yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi manfaat lingkungan budaya ditingkatkan melalui sumber daya lokal dan bertanggung jawab. Dengan adanya hal tersebut, Partisipasi masyarakat dalam desa wisata dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas wisata yang didesain dan disediakan oleh masyarakat Lokal (Junaid et al., 2022a).

Hubungan Community Based Tourism dengan fungsi administrasi Publik dicantumkan dengan regulasi yang mengatur terkait pariwisata lokal. Pelaksanaan wisata berbasis masyarakat atau komunitas lokal diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 pasal 29 yang mengatakan bahwasannya dalam mengembangkan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pariwisata, pemerintah mengupayakan adanya pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dan pengembangan kepariwisataan, memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan serta menguatkan kelembagaan masyarakat dan

pemerintah di tingkat lokal untuk mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

Selain diatur dalam Undang-Undang, Dalam Matthoriq et al., (2021) bahwasannya *Community Based Tourism* dapat dihubungkan dengan Administrasi Publik karena adanya era governance menuntut pemerintah untuk berkomitmen dengan sektor swasta maupun organisasi non-pemerintah. Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan pariwisata menjadi strategis karena governance menekankan prinsip koordinasi, kemitraan, serta partisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan *Community Based Tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata lokal. Pernyataan ini juga dikuatkan dalam laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwasannya

“adanya forum konsultasi publik, kita dapat membuka jalan untuk dapat berkolaborasi dengan banyak pihak, dan tentunya dapat memantik lahirnya inovasi dan kreasi baru dalam pelayanan di sektor kepariwisataan, hal ini masukan dari Masyarakat sangat diutamakan”. Sumber : <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/masukan-masyarakat-perlu-untuk-kolaborasi-peningkatan-area-wisata> . Diakses 20 November 2025

Untuk menjaga eksistensi suatu destinasi desa wisata, upaya penguatan program keberlanjutan perlu ditingkatkan secara sistematis. Dalam hal ini, pendekatan *Community Based Tourism* menjadi strategi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan destinasi desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaannya. *Community Based Tourism* diartikan sebagai pariwisata berkelanjutan yang dapat

membantu masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan melainkan mengembangkan potensi alam pedesaan yang dimiliki. Selain itu, *Community Based Tourism* dijadikan alur untuk memahami beberapa implikasi pembangunan pariwisata dari sudut pandang masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan faktor yang mempengaruhi adanya keberhasilan destinasi pariwisata dalam jangka panjang dan berkelanjutan (Ilhami & Salahudin, 2021a).

Menurut Syafiqah et al., (2022) mendefinisikan bahwa *Community Based Tourism* merupakan pembangunan pariwisata masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga dalam pengembangannya mensyaratkan adanya partisipasi, kontrol dan manfaat budaya, politik serta lingkungan. Dengan adanya hal tersebut, *Community Based Tourism* sangat cocok untuk dikembangkan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan serta pada proses penerapannya dapat dianalisis terkait tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Selanjutnya, kesinambungan antara dengan Pariwisata berkelanjutan *Community Based Tourism* dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata merupakan prasyarat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya penerapan *Community Based Tourism* yang memanfaatkan penduduk lokal dalam pengembangan desa wisata, dan konsep *Community Based Tourism* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sehingga dapat mewujudkan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan (Anarini et al., 2024).

Tujuan utama dari penerapan *Community Based Tourism* (CBT) adalah untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada wisatawan sekaligus memberikan pengalaman langsung mengenai kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, *Community Based Tourism* juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setempat. Esensi dari konsep *Community Based Tourism* terletak pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya dalam sektor pariwisata. Dalam praktiknya, destinasi wisata yang menerapkan *Community Based Tourism* dikelola langsung oleh komunitas lokal, mulai dari aspek pengembangan, peningkatan kualitas, hingga penyediaan layanan wisata (Syarifah & Rochani, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang perekonomian yakni Airlangga Hartanto dalam laman media online Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2022).

“Pariwisata berkelanjutan secara sosial harus diterapkan untuk memastikan uang yang dihabiskan untuk perjalanan tetap berada di masyarakat. Ini termasuk dalam upaya mendukung bisnis yang dijalankan atau dikelola oleh masyarakat lokal untuk mendukung ekonomi lokal.”. Sumber: <https://www.ekon.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan bahwa prinsip dari pariwisata berkelanjutan perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pelaku usaha perjalanan serta pemangku kepentingan. Dalam konteks keberlanjutan Masyarakat Lokal, pelaku industri pariwisata diharapkan dapat melibatkan komunitas setempat secara aktif, menjaga keaslian nilai sosial dan budaya setya adanya kontribusi dalam

pelestarian warisan budaya. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun adanya keberlanjutan dari segi sosial.

Menurut Iqbal (2022) terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan program *Community Based Tourism* dengan ditentukan beberapa faktor, diantaranya adanya partisipasi aktif dalam perencanaan dan kapasitas dalam mengelola program pariwisata di daerah nya, penguatan perihal kolaborasi untuk memfasilitasi pengembangan program terutama pada sumber daya keuangan. Selain itu, penting untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalin kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta, serta menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain faktor yang menentukan keberhasilan penerapan *Community Based Tourism* juga terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam penerapan *Community Based Tourism* yaitu : sumber pembiayaan, pemasaran destinasi sehingga mendatangkan wisatawan yang mana memungkinkan terjadi overtourism, pengembangan produk wisata yang belum sempurna dan belum siap untuk dipasarkan.

Menurut laporan dari [jadesta.kemenparekraf.go.id](http://jadesta.kemenparekraf.go.id) (2025) Jawa timur sebagai provinsi yang memiliki desa wisata terbanyak dengan jumlah 614 desa wisata. Desa wisata di Jawa Timur mendapatkan penghargaan penghargaan dalam kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 yang digelar oleh kementerian pariwisata dan jawa timur menyandang predikat sebagai provinsi terbanyak dalam memperoleh juara. Dengan adanya penghargaan yang

diterima Desa Wisata di Jawa Timur, hal ini sebagai bentuk kesempatan pemerintah Jawa Timur untuk mempromosikan lebih luas hingga mencapai level internasional.

Desa wisata tersebut berhasil menjadi contoh pengembangan desa wisata yang inspiratif sehingga layak menjadi contoh bagi desa wisata lainnya untuk terus mengembangkan potensi pariwisata berbasis masyarakat yang ada di daerahnya. salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Menurut jatim.bpk.go.id (dikutip 2025) Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik; sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan; sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto; serta sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Madura. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Timur, yaitu seluas 63.438,534 hektare atau setara dengan 634,39 km<sup>2</sup>. Wilayah ini diapit oleh dua aliran sungai utama, yakni Kali Surabaya sepanjang 32,5 km di bagian barat laut dan Kali Porong sepanjang 47 km di bagian tenggara. Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai wilayah penyangga utama bagi ibu kota provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya. Perkembangan tersebut tidak lepas dari optimalisasi dari berbagai potensi wilayah seperti sektor pariwisata, industri dan perdagangan, usaha kecil menengah dengan dikelola secara sistematis dan terarah serta berkelanjutan.

Di Sidoarjo pariwisata merupakan salah satu potensi utama yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan, baik dikembangkan dari segi khas dan kualitas. Potensi pariwisata di Sidoarjo bersumber dari sumber daya alam dan

budaya Lokal yang tersebar dalam 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan pendapatan pada sektor pariwisata meningkat setiap tahunnya, dengan jenis potensi onjek wisata sebagai berikut Jenis objek wisata yang tersedia mencakup wisata alam, buatan, sejarah, religi, budaya, edukasi, olahraga, hingga wisata industri dan ruang terbuka hijau (RPJMD Sidoarjo, 2021-2026). Menurut Radar Sidoarjo (2025) usaha dalam meningkatkan potensi sumber daya lokal di sektor pariwisata terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama pada desa wisata. Terdapat 21 titik yang ditetapkan sebagai desa wisata.

“Kepala Disporapar Sidoarjo Djoko Supriyadi mengatakan, nantinya pengembangan desa wisata juga sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dia menilai, banyak potensi-potensi wisata yang terus digali dandikembangkan”. Sumber : <https://radarSidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85933422/tingkatkan-potensi-pemkab-Sidoarjo-kembangkan-21-desa-wisata>. Dikutip tanggal 15 Mei 2025

Terdapat lima desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Lima desa yang memiliki potensi tersebut yakni Desa Candi Pari di Kecamatan Porong, Desa Ponokawan di Kecamatan Krian, Dusun Tlocor di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon, Desa Pagerngumbuk Kecamatan wonoayu, dan Desa Wisata Lumpur Porong yang akan dikembangkan. Kampung Lali Gadget, desa wisata yang terletak di Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata. Kampung Lali Gadget merupakan salah satu desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Hasil observasi menunjukkan terdapat komunitas sipil di Desa Pagerngumbuk yang menjadi Inisiator berdirinya Kampung Lali Gadget yang merupakan bagian dari komunitas kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Pemuda Pelopor. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2019 Komunitas Pemuda Pelopor adalah partisipasi aktif dari pemuda dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun kancah internasional. Kegiatannya berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga berdirinya Kampung Lali Gadget merupakan responsivitas dari Achmad Irfandi karena keprihatinannya terhadap kebiasaan anak-anak dan remaja yang bergantung pada penggunaan gadget. Kampung Lali Gadget dapat dikatakan sebagai alternatif edukatif yang menawarkan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan karakter, kecerdasan sosial, serta kemandirian anak dengan berbagai program seperti taman baca, pengenalan makanan tradisional, permainan tradisional, pengelolaan sampah dan terdapat workshop. Sasaran program di Kampung Lali Gadget tidak hanya anak-anak namun melibatkan orang tua melalui parenting (Sari, 2021). Menurut Elok Kinanti et al., (2023), penggunaan mantra sebelum memulai permainan tradisional salah satu kebiasaan yang ada di Kampung Lali Gadget. Mantra merupakan suatu ucapan yang diyakini dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan, serta menciptakan suasana kebebasan dalam bermain (Muratni, 2020). Mantra bermain yang

digunakan di Kampung Lali Gadget adalah “*Hompimpa Alaihom Gambreng*” sebagai simbol penyemangat dan harmonisasi antar peserta.

**Gambar 1.1 Permainan Tradisional**



**Sumber : Dokumentasi Pribadi**

Setiap kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Lali Gadget yang diajarkan oleh pemandu wisata fungsinya untuk mengarahkan rangkaian aktivitas agar berjalan terstruktur dan sesuai. Adapun permainan tradisional yang dimainkan di Kampung Lali Gadget meliputi beberapa tema setiap minggunya, seperti *Dolanan Kembang*, *Watu Kreweng*, dan *Kelir*. Selain itu, tersedia pula paket *city tour* untuk anak-anak dalam kegiatan *outdoor class*. Permainan tradisional lainnya juga tersedia alatnya di Kampung Lali Gadget seperti Egrang, Kelompen Tali, Bakiak, Dakon, Holahop, dan permainan lainnya. Keberagaman permainan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak.

**Gambar 1.2 Workshop Etika Penyajian Makanan**



**Sumber : Dokumentasi Pribadi**

Selain itu, Kampung Lali Gadget secara konsisten mengembangkan potensi lokal berbasis komunitas melalui berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat sekitar, pengunjung dan pemandu wisata. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian antara lain workshop etika penyajian makanan tradisional serta pelatihan pembuatan permainan dari bahan alami, seperti mobil-mobilan dari serabut batok kelapa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan nilai-nilai estetika, tetapi juga menanamkan prinsip ramah lingkungan dan meningkatkan keterampilan masyarakat secara kreatif dan partisipatif.

“Pelaksanaan workshop ini sebagai nemtuk partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Kampung Lali Gadget namun untuk waktu dan tema tidak terjadwalkan, kami rencanakan spontan saja nunggu di hari yang kosong”. Wawancara pribadi tanggal 25 mei 2025.

Dalam konteks Community-Based Tourism, keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang

berkelanjutan. Masyarakat dilibatkan secara aktif maupun pasif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, melalui forum musyawarah bersama pengelola wisata. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat (Ardianti & Eprilianto, 2022).

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kampung Lali Gadget terdapat dampak lain yang dapat dirasakan yakni peluang ekonomi. Menurut Astuti & Listyaningsih (2021) keberadaan Kampung Lali Gadget memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Seperti pada **tabel 1.1** berikut :

NO	Nama Pedagang	Pendapatan Tertinggi	Pendapatan terendah	Rata-Rata Omset
1.	Siti Julaikah	Rp. 2.000.000	Rp. 300.000	Rp. 1.000.000
2.	Enik Amaliyah	Rp. 800.000	Rp. 150.000	Rp. 500.000
3.	Delfi	Rp. 900.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000
4.	Munir	Rp. 500.000	Rp. 100.000	Rp. 300.000
5.	PKL lain	Rp. 500.00	Rp. 250.000	Rp. 350.000

**Sumber : sustainability Report Kampung Lali Gadget, 2024**

Hal tersebut dilihat pada saat Kampung Lali Gadget terdapat kegiatan kunjungan sehingga masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk menjual berbagai jenis makanan ringan kepada para pengunjung. Harapan masyarakat terhadap Kampung Lali Gadget cukup tinggi karena membantu perekonomian masyarakat sekitar Kampung Lali Gadget. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang berjualan di lokasi, menyampaikan bahwa

meningkatnya jumlah pengunjung mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara ekonomi.

“Awalnya saya melihat kok semakin lama tambah rame akhirnya saya minta izin ke mas Irfandi untuk berdagang, untuk pendapatan saya juga lumayan cukup sekitar 1 juta tergantung pengunjung yang datang. Setelah diizinkan Alhamdulillah enak nya lagi tidak membayar sewa tempat”. Wawancara pribadi dengan Mbak Juliah (pedagang). Tanggal 23 Maret 2025.

Pernyataan dari salah satu pelaku usaha di Kampung Lali Gadget tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa beban biaya sewa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Menurut Eko (2024) dari sisi ekonomi, *Community Based Tourism* memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui keterlibatan langsung pada wisata. Salah satu yang dapat diupayakan masyarakat dalam membuka peluang usaha di pariwisata adalah menyediakan homestay, jasa pemandu wisata, kerajinan tangan dan usaha kuliner tradisional dengan tujuan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata berbasis masyarakat berperan dalam mendiversifikasi ekonomi masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan iklim.

Menurut Potjana Suansri (2003) menjelaskan bahwa dalam pengembangan wisata berbasis *Community Based Tourism* terdapat 5 lima dimensi yang harus dijalankan sebagai aspek utama pembangunan kepariwisataan, yaitu 1) Dimensi Ekonomi: ditandai dengan tersedianya dana untuk mendukung pembangunan komunitas, terciptanya lapangan kerja di sektor pariwisata, serta adanya

peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan pariwisata. 2) Dimensi Sosial: terlihat dari peningkatan kualitas hidup warga, tumbuhnya rasa bangga terhadap komunitas, adanya pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan serta antara generasi muda dan tua, serta penguatan kelembagaan komunitas. 3) Dimensi Budaya: mencakup dorongan untuk menghargai perbedaan budaya, mendorong terjadinya pertukaran budaya, dan mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan ke dalam budaya lokal. 4) Dimensi Lingkungan: melibatkan upaya untuk memahami daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), pengelolaan limbah secara tepat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. 5) Dimensi Politik: tercermin dalam meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, penguatan kekuasaan komunitas dalam skala yang lebih luas, serta perlindungan hak-hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam.

Namun demikian, meskipun pengembangan Kampung Lali Gadget memberikan berbagai manfaat positif, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi potensi kawasan tersebut. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah pelaku usaha atau pedagang pembuka kios. Berdasarkan data dari Satu Data Sidoarjo, (2023), jumlah penduduk Desa Pagerngumbuk, tempat berdirinya Kampung Lali Gadget, tercatat sebanyak 3.158 jiwa. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,32%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya terdapat empat kios di sekitar area wisata, sehingga

dampak ekonomi yang dihasilkan belum menyebar secara merata ke seluruh masyarakat setempat. Jumlah tempat sampah yang perlu ditambah baik ukuran yang besar dan yang kecil, serta pentingnya menambahkan himbauan untuk memilah sampah organik dan anorganik untuk memudahkan pengelompokan di akhir pembuangan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang berperan sebagai pemandu wisata juga sangat terbatas dan tidak menetap, disebabkan karena adanya kesibukan masing-masing individu.

Dengan adanya penjelasan permasalahan diatas, beberapa penelitian terdahulu yang relevan yakni oleh Syafiqah et al., (2022) dengan judul Implementasi Konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang di Kabupaten Bandung Barat yang menyatakan bahwasannya penerapan konsep *Community Based Tourism* cocok dikembangkan untuk mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan penelitian Anarini et al., (2024) menyatakan bahwa pada penerapan *Community Based Tourism* memanfaatkan penduduk lokal dalam mengembangkan desa wisata sebagaimana konsep tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan di ranah masyarakat lokal hal ini dapat mewujudkan dari presensi sustainable tourism.

Dari pernjelasana Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **“Penerapan *Community Based Tourism* dalam pengembangan Desa wisata berkelanjutan di Kampung Lali Gadget, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan Desa Wisata berkelanjutan di Kampung Lali Gadget?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yg ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *Community Based Tourism* di Desa Wisata berkelanjutan Kampung Lali Gadget Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### 2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penbelitian yang sejenis, pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### 3. Bagi Desa Wisata Kampung Lali Gadget

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ide dan wawasan yang bermanfaat sebagai masukan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Kampung Lali Gadget, agar ke depannya bisa tercipta wisata yang berkelanjutan di wilayah tersebut, tepatnya di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.